

Judul : APBN-P: Banggar Sepakati Pemotongan Anggaran Kemenko
Tanggal : Selasa, 14 Juni 2016
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 2

APBN-P

Banggar Sepakati Pemotongan Anggaran Kemenko

JAKARTA (Suara Karya): Badan Anggaran DPR RI menyepakati pemotongan anggaran terhadap empat kementerian koordinator dengan catatan tidak mengganggu kinerja dan target capaian kerja masing-masing.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar Kahar Muzakir dengan Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Maritim dan Energi serta Menko Polhukam di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin disepakati pengurangan anggaran yang diatur dalam APBN Perubahan 2016.

Menko PMK Puan Maharani mengatakan anggaran kementeriannya pada 2016 sebesar Rp487,3 miliar dan mendapat pengurangan sebesar Rp95,3 miliar pada APBN Perubahan 2016.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pagu anggaran kementeriannya pada 2016 Rp 361,614 miliar ditambah titipan anggaran untuk Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN).

"Anggaran yang dititipkan ke kami dari KEIN Rp 41,7 miliar," kata Darmin, seperti dikutip *Antara*.

Dengan adanya titipan anggaran untuk KEIN tersebut maka pagu awal Kemenko Perekonomian menjadi Rp 401,6 miliar. "Dengan pemotongan 15 persen, totalnya Rp42,3 miliar. Pagu anggaran APBN Perubahan 2016 menjadi Rp359,2 miliar," katanya.

Sementara itu Menko Maritim dan Energi, Rizal Ramli mengatakan bisa menerima pemotongan anggaran sehingga kementerian koordinator yang dipimpinnya dalam APBN Perubahan 2016 akan menjadi Rp414,1 miliar.

Pengurangan Terbatas Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dalam rapat kerja dengan Banggar yang berlangsung hingga pukul 14.00 WIB tersebut menyatakan bisa menerima rencana pemotongan anggaran sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2016 namun meminta agar persentase pemotongan anggaran yang dibahas dalam Banggar tidak sebesar yang diusulkan.

Kemenko Polhukam diusulkan mendapatkan pengurangan anggaran sebesar 17,69 persen.

Dengan pagu anggaran Rp292,6 miliar, pemotongan sebesar Rp51,7 miliar maka APBN P 2016 untuk kementerian koor-

dinator polhukam diusulkan menjadi Rp240,9 miliar.

Luhut mengatakan dengan beban kerja yang ada ia mengharapkan agar persentase pemotongannya lebih kecil.

Sejumlah anggota Banggar menyatakan pemotongan anggaran bagi Kemenko Polhukam sebaiknya bisa dihindari karena lingkup kerja dan juga pada 2017 mendatang akan dilangsungkan pilkada serentak.

Beberapa anggota Banggar mengeluarkan pandangan agar Kemenko Polhukam tidak mendapat pemotongan anggaran.

Namun demikian Luhut menjelaskan pihaknya tetap menerima adanya pemotongan anggaran agar sama dengan kementerian dan lembaga lainnya.

"Anggaran kami juga dipotong namun besarnya kalau bisa lebih kecil. Kami juga melakukan efisiensi," kata Luhut kepada wartawan usai rapat.

Rapat antara Banggar dengan Menko Perekonomian, Menko PMK dan Menko Maritim dan Energi berlangsung secara bersamaan, sementara rapat dengan Menko Polhukam berlangsung pada sesi kedua. (has)